



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
DENGAN SISTEM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*
(E-TLE) DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan
pendidikan Program Studi Hukum Program Sarjana**

Disusun oleh :

Arum Wulan Sari

NPM. 211003742018411

SEMARANG

2025



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
DENGAN SISTEM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (E-
TLE) DI KOTA SEMARANG**


SKRIPSI

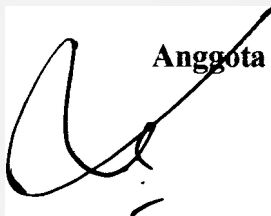
**Telah Dilakukan Pengujian Dihadapan Tim Penguji
dan Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Disusun Oleh :
Arum Wulan Sari
NPM. 211003742018411**

**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua**


Mahmuda Pancawisma F., S.H., M.Hum.
NIDN : 0614026601

Anggota

Dr. Agus Wibowo, S.H., M.Si.
NIDN. 0613086201

Anggota

Dr. Kunarto, S.H., M.Hum.
NIDN. 0619036404

**Mengetahui,
Dekan**

Prof. Dr. Edy Listiyono, S.H., M.Hum.
NIDN. 0625046301

**SEMARANG
2025**

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang terus berkembang dengan adanya penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE). Sistem ini menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis, sehingga meminimalisir interaksi langsung antara petugas kepolisian dan pelanggar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem E-TLE dalam meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya di masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Peraturan yang mendasari pelaksanaan E-TLE, yaitu UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2) Penegakan Hukum dengan sistem E-TLE, yaitu perekaman pelanggaran, pengumpulan data, pengiriman surat konfirmasi pelanggaran dan konfirmasi pemilik kendaraan, pembayaran denda, 3) Terdapat beberapa hambatan, seperti masalah sarana dan prasarana, serta kendala terkait kendaraan yang telah berpindah kepemilikan, maka solusinya optimalisasi pemotretan pelanggar sebagai bukti, membuat surat pernyataan kendaraan sudah dijual, kewajiban untuk mengurus kelengkapan kendaraan yang tidak terdaftar dengan baik.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Negara Hukum	10
B. Negara Kesejahteraan.....	12
C. Penegakan Hukum	13
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	13
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	16
D. Pelanggaran Lalu Lintas.....	18
1. Pengertian Pelanggaran	18
2. Pengertian Lalu Lintas.....	20
3. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	21
4. Faktor-Faktor Pelanggaran Lalu Lintas	23
E. <i>Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)</i>	25
1. Pengertian <i>Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)</i>	25
2. Perbedaan Tilang Manual dengan <i>Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)</i>	26

3. Alur Proses <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (E-TLE)	27
4. Cara Melakukan Pembayaran terhadap Pelanggaran <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (E-TLE)	28
BAB III	33
METODE PENELITIAN	33
A. Tipe Penelitian.....	33
B. Spesifikasi Penelitian	34
C. Sumber Data.....	34
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Metode Penyajian Data	37
F. Metode Analisa Data	38
BAB IV	40
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	40
A. Peraturan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dengan Sistem <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (E-TLE)	40
B. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dengan Sistem <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (E-TLE) di Kota Semarang	49
C. Hambatan yang Dihadapi dan Solusi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Kota Semarang dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dengan Sistem <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (E-TLE) di Kota Semarang	61
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	76